

**JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FAKHRUL ROJI

NIM. 180801026

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhrul Roji

Nim : 180801026

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosisal Dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Parawisata Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UIN
AR - RANIRY

Banda Aceh, 11 Mei 2024

Yang Menyatakan.



Fakhrul Roji

JEJARING KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PARIWISATA ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

FAKHRUL ROJI

NIM: 180801026

Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/muqasvahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M. Hum

NIP. 19737232000032002



Melly Masni, M.I.R

NIP.199305242020122016

**JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PARAWISATA
ACEH SELATAN**

**FAKHRUL ROJI
180801026**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis (13) juni 2024 M
(6) Zulhijjah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 1973723200002002

Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

Dr. Dede Suhendra, S. Sos, M.H
NIP. -

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Abstrak

Jejaring kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Aceh Selatan khususnya mencerminkan distribusi kekuasaan di antara berbagai lini pemerintahan, aktor-aktor ini dapat melakukan pengembangan pada destinasi pariwisata serta menyelesaikan hambatan dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Aceh selatan.

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui jejaring kebijakan dalam pengelolaan pariwisata Aceh Selatan, dan mendeskripsikan tantangan dan peluang dalam jejaring kebijakan pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan

Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan hasil analisa data lapangan dan analisa kebijakan pemerintah bidang pariwisata di Aceh Selatan.

Hasil penelitian ini adalah Arah kebijakan pengembangan pariwisata aceh selatan sangat bergantung dengan jejaring pariwisata Aceh selatan hhususnya Dinas Pariwisata Aceh Selatan. Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata Aceh Selatan jejaring kebijakan dan pengelolaan Pariwisata Di Aceh Selatan memiliki 2(dua) jalur yang saling berkaitan yakni antara pemerintah dan Non-pemerintah. Pariwisata Aceh Selatan menghasilkan potensi peluang yang dapat dimanfaatkan mendorong stabilitas Perekonomian dari aset destinasi wisata yang tumbuh dengan memanfaatkan sektor UMKM untuk menjadi mata pencaharian masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Selatan.

Saran penelitian ini adalah Pemerinta harus meningkatkan diskusi dan interaksi lapangan terhadap masyarakat harus terjalin dengan baik, pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Aceh Selatan dapat melakukan komunikasi dan sosialisasi tidak hanya rancangan tetapi terjun ke masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jejaring kebijakan, mempekerjakan divisi lingkungan, untuk melebur dan membangun pariwisata Aceh Selatan. Pentingnya dibuat standart operation prosedur (SOP), karena masih di temukan permasalahan sampah dan kebingungan wisatawan dalam menentukan petunjuk pada saat sedang melakukan rekreasi di Aceh selatan, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dan pengembangan destinasi wisata Aceh Selatan, dapat di pahami seperti petunjuk arah, larangan membuang sampah, dan pengelolaan tempat parkir.

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2. Landasan Teori	17
2.2.1. Jejaring Kebijakan (<i>Policy Network</i>)	17
2.2.2. Pertumbuhan Pariwisata Sebagai Akibat Pengembangan	21
2.2.3. Pengaruh Peningkatan Destinasi Pariwisata	29
2.2.4. Dinas Pariwisata Aceh Selatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Pendekatan Penelitian	38
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Lokasi Penelitian	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	38
3.5. Informan Penelitian	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Teknik Analisis Data	42
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	44
4.1 Profil Pariwisata Aceh Selatan	44
4.2 Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata	46
4.3 Tantangan Dan Peluang	52
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, sehingga dunia pariwisata menjadi salah satu sektor industri terbesar. Aceh Selatan dalam perkembangannya sebagai pariwisata yang maju, mengandalkan sektor pariwisata seutuhnya tanpa mengelolanya potensinya secara baik dalam segi manajemen, dapat melemahkan pembangunan baik terhadap pariwisata maupun terhadap daerah itu sendiri. Seperti yang terjadinya saat ini, hingga sekarang pengembangan pariwisata yang ada di Aceh Selatan masih belum mampu di optimalkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena masih banyaknya sarana dan prasarana yang minim dan kurang memadai pada destinasi-destinasi objek wisata.

Pariwisata Aceh Selatan pada dasarnya memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai produk lokal yang diperjualbelikan, serta berbagai fasilitas penunjang pariwisata lainnya yang digunakan oleh para wisatawan.¹ PAD tersebut menjadi cikal bakal adanya anggaran politik untuk berbagai program pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Tentunya tingginya PAD dapat lebih memberikan nilai

¹ Andy Andriwiguna. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Memahami Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Semesta Media, 2020), hlm. 4.

positif bagi perekonomian daerah.² Pariwisata Aceh Selatan memanfaatkan alam sebagai daya tarik kepada wisatawan, pengelolaan pariwisata Aceh Selatan juga menggunakan tenaga dan kolaborasi dari desa ke desa, namun penelitian yang dilakukan oleh Alja Yusnadi mengatakan bahwa pemanfaatan anggaran desa masih sangat kecil yaitu 1,01% dari total penerimaan anggaran desa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam pengelolaannya, yakni keterbatasan sumber daya manusia, ketidakmampuan menemukan sektor usaha, krisis kepercayaan masyarakat.³

Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena industri pariwisata dapat bersinergi dengan produk-produk yang dihasilkan dari sektor lain, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa bagi negara sekaligus digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja yang berdampak pada pengurangan angka pengangguran.⁴

Aceh Selatan sendiri memiliki sejarah panjang yang sangat berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata. Legenda Tuan Tapa di Tapak Tuan yang menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, misalnya, menyuguhkan legenda tapak raksasa yang sedari dahulu telah banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Pulau Dua yang berada di Samudera Hindia, keindahan alam di sekeliling daerah selatan wilayah Aceh dan alam bawah laut, pantai dan pegunungan. Bukan hanya itu, hampir di

² Andy Andriwiguna. Ibid. hlm 8

³ Alja Yusnadi. *Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Anggaran Desa Di Kabupaten Aceh Selatan*. Aceh Tengah: Jurnal Universitas Gadjah Putih 2018). hlm 2

⁴ Andy Andriwiguna, Ibid. hlm 14

setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi objek wisata yang baik, seperti tempat wisata Puncak Gunung Sigantang Sira, Pulau dua, Bentang trumon, Pemandian Panjupian. Desa lhokreukam memiliki potensi wisata yang cukup tinggi untuk dikembangkan, karena di dukung oleh letak geografi dari desa tersebut. Lhokreukam memiliki pantai yang cukup panjang dengan hamparan pasir yang masih asri. Objek wisata lainnya yang dapat kita temui di Desa Lhokreukam adalah Pantai Pasir Setumpuk yang menawarkan suasana pantai yang berbeda dan tersembunyi karena terletak jauh dari pemukiman penduduk,⁵ Dasar tersebut menjadikan Aceh Selatan memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata, terutama untuk menopang perekonomian masyarakat dan pemerintah setempat.⁶

Menyadari manfaat pariwisata tersebut, pengembangan sektor ini mulai menjadi salah satu program unggulan pembangunan di Aceh Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Pariwisata Aceh Selatan, dalam mewujudkan Visi-Misi Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 yakni peningkatan ekonomi kerakyatan, perluas lapangan pekerjaan dari sector produksi dan jasa. Arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan difokuskan pada 4 item utama. Pertama, penguatan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi informasi. Kedua, revitalisasi dan optimalisasi destinasi wisata. Ketiga,

⁵ Resky Rusnanda dkk. *Kajian Potensi Dan Rekomendasi Desa Lhokrukam Berbasis Desa Wisata, Sebagai Alternatif Pembangunan Kota Tapaktuan*. (Aceh Selatan:Jurnal Inotera). 2016. hlm 13.

⁶ Kabupaten Aceh Selatan. *Sejarah Kabupaten Aceh Selatan*. Di akses dari: <https://acehselatan.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> diakses pada tanggal 8 Maret 2024

menciptakan event dalam menunjang pariwisata daerah. Keempat, peningkatan pendapatan PAD sektor pariwisata.⁷

Destinasi wisata yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan berbasis pada masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Di samping itu, pembangunan pariwisata juga dapat menciptakan pemasukan yang dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan yang secara langsung menyentuh masyarakat setempat.⁸

Tabel 1.1. Jumlah Kunjungan Pariwisata ke Aceh Selatan

NO.	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jiwa)
1.	2019	475.563
2.	2020	259.838
3.	2021	72.074
4.	2022	245.417
5.	2023	158.033

Sumber: Dinas Pariwisata Aceh Selatan⁹

Objek pariwisata menjadi subjek pengembangan dan pengelolaan karena tujuan kunjungan pariwisata adalah destinasi wisata, dimana destinasi wisata adalah tempat penyedia berbagai fasilitas pariwisata. Baik fasilitas pariwisata alamiah seperti keindahan pantai atau berbagai sumber daya alam di suatu tempat, maupun

⁷ Pemerintah Aceh Selatan. Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Pariwisata Aceh Selatan, (Aceh Selatan: Pemerintah Aceh Selatan, 2019), hlm. 31.

⁸ Andy Andriwiguna, Ibid. hlm 20.

⁹ Dinas Pariwisata Aceh Selatan. Jumlah Kunjungan Pariwisata ke Aceh Selatan. pada tanggal 14 September 2023

fasilitas pariwisata yang diciptakan sedemikian rupa hingga menjadi destinasi wisata.¹⁰

Berbagai fasilitas pada destinasi wisata dapat disediakan oleh sektor swasta maupun sektor publik, baik yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintahan desa atau *gampong*¹¹. Destinasi wisata tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Destinasi wisata yang ada di Aceh kaya akan keindahan alam. Masing-masing Kabupaten/Kota di Aceh memiliki kelebihannya tersendiri sebagai Objek Pariwisata,¹² begitu pula dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang cukup terkenal dengan destinasi wisatanya. Kabupaten ini juga selalu masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API), yang merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan sebagai upaya untuk membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata di Indonesia. Penyelenggaraan API Award sendiri diharapkan mampu mendorong peran dari berbagai pihak, baik dari pihak masyarakat, pihak swasta maupun pemerintahan Daerah Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk mempromosikan pariwisata serta mengembangkan ekonomi kreatif secara langsung, nyata dan masif di masing-masing daerah.¹³ Aceh Selatan sendiri memenangkan dua kategori mewakili Provinsi Aceh pada tahun 2020 destinasi

¹⁰ Aniesa Samira Bafadhal. *Perencanaan Bisnis Pariwisata*, (Malang: MNC Publishing, 2022), hlm. 7.

¹¹ Aniesa Samira Bafadhal. *Ibid.*

¹² Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. (2020, 31 Desember). Keragaman Wisata Aceh yang Elok untuk Dijelajahi. *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*. Diakses dari <https://disbudpar.acehprov.go.id/keragaman-wisata-aceh-yang-elok-untuk-dijelajahi/>

¹³ Anugerah Pesona Indonesia. (2022). *Tentang API Award*. Diakses dari <https://apiaaward.com/about/>.

wisata Batu Rencong dan Wisata Air Surfing Samadua, 3 kategori pada tahun 2021 berhasil memberikan kemenangan pada ajang Api Award yakni Anjungan Tapa Tuan Tapa, Puncak Sigantang Sira, dan 2 kategori juara Api Award pada tahun 2022 Situs Sejarah Benteng Trumon dan Destinasi Kreatif Pulau Dua, serta pada tahun 2023 menjuarai Api Award, kali ini pada kategori minuman tradisional yakni Jus Nipah

Penerapan fungsi dan pengelolaan pariwisata Aceh Selatan melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka daripada itu interaksi pemerintah pada proses perencanaan, pengendalian dan perkembangan dibutuhkan keselarasan, pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlangsungan destinasi wisata yang akan datang, Koordinasi antar lembaga yang begitu kompleks dibantu dengan masyarakat sehingga ide dan strategi Dinas Pariwisata menjadi mudah direalisasikan.

Pemerintah Aceh Selatan melalui Dinas Pariwisata dan seluruh *stakeholders* di bidang pariwisata Aceh Selatan memiliki keseriusan yang tinggi dalam mendukung perkembangan objek wisata atau destinasi wisata yang ada di Aceh Selatan terdapat beberapa hambatan yang dapat melemahkan perkembangan Pariwisata Aceh Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jejaring kebijakan dalam sektor pariwisata aceh selatan, menggali peran, sumber daya, hingga peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di Aceh Selatan.

Adapun relevansi penelitian ini bagi kajian ilmu politik adalah karena jejaring kebijakan pemerintah khususnya Pengembangan Pariwisata Aceh Selatan mencerminkan distribusi kekuasaan di antara berbagai lini pemerintahan. Dalam konteks pariwisata, aktor-aktor ini dapat melakukan pengembangan pada destinasi pariwisata Aceh Selatan meliputi pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan daerah, industri pariwisata, peran masyarakat lokal dalam peningkatan sumber daya manusia, dan lain lain. Atas alasan tersebut penelitian ini penting untuk dilakukan, analisis jejaring kebijakan dapat memperlihatkan bagaimana kebijakan pariwisata dibentuk dan dilaksanakan. Substansi ilmu politik dalam rangka memahami proses pembentukan kebijakan, koalisi yang terbentuk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jejaring kebijakan dalam pengelolaan pariwisata Aceh Selatan?
2. Apa saja tantangan dan peluang jejaring kebijakan dalam pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang berusaha dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jejaring kebijakan dalam pengelolaan pariwisata Aceh Selatan.
2. Mendeskripsikan tantangan dan peluang dalam jejaring kebijakan pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang menjadi harapan besar dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik tentang kebijakan publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu politik, khususnya studi Pembangunan Politik dan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Aceh, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam memperbaiki serta mengevaluasi Kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata.
- b. Bagi Pemerintah Aceh Selatan agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam memperbaiki serta mengevaluasi Kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata di Aceh Selatan dengan menggunakan prinsip jejaring kebijakan.